

Akakal-akalan Anggota Dewan

Politikus Senayan tak pernah kehabisan akal. Setelah usulan dana aspirasi dan dana desa kandas, kini mereka mengajukan gagasan baru: rumah aspirasi. Meski tak ada lagi kata “dana”, intinya sama saja, yakni meminta negara mengguyurkan sejumlah duit kepada mereka.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mestinya paham alasan penolakan publik dan pemerintah terhadap kedua usulan sebelumnya. Pembagian dana aspirasi maupun dana desa merupakan pemborosan karena tumpang-tindih dengan program pemerintah. Dilihat dengan kaca mata yang sama, usulan mengenai rumah aspirasi juga menghambur-hamburan uang negara. Soalnya, tak ada jaminan bahwa, dengan adanya rumah aspirasi, politikus Senayan jadi lebih peduli kepada nasib konstituennya.

Bila melihat dana yang akan diterima per anggota Dewan, yakni Rp 200 juta, angka ini terasa kecil. Tapi, setelah dikalikan dengan jumlah anggota DPR sebanyak 560, akan muncul angka Rp 112 miliar. Duit sebanyak ini amat besar faedahnya jika digunakan untuk program membantu rakyat kecil.

Politikus Senayan tak perlu memiliki rumah aspirasi, karena mereka seharusnya lahir atau tinggal lama di daerah pemilihan masing-masing. Itu sebabnya, setelah terpilih dan mesti tinggal di Jakarta, mereka mendapat rumah dinas. Anggota Dewan merasa perlu punya rumah di daerah lantaran sebagian besar mereka selama ini tinggal di Ibu Kota.

Risiko pola rekrutmen calon legislator yang tidak ideal itu seharusnya mereka tanggung sendiri, bukannya dibebankan ke negara. Kenapa anggota Dewan yang telah memiliki rumah di Jakarta tidak mengalihkan saja fasilitas rumah dinas mereka untuk mendirikan rumah aspirasi? Adapun para anggota Dewan yang berasal dari daerah tentu lebih memerlukan rumah dinas di Ibu Kota ketimbang rumah aspirasi.

Kalau mau, mereka bisa pula membiayai rumah aspirasi itu dengan gaji mereka. Soalnya, biaya operasional bertemu dengan masyarakat sebenarnya sudah masuk ke komponen pendapatan mereka sebagai anggota Dewan. Cara inilah yang dilakukan Budiman Sujatmiko. Dari gajinya yang Rp 65 juta per bulan, politikus PDI Perjuangan itu menyisihkan Rp 20 juta untuk rumah aspirasi.

Usulan mengenai pembiayaan rumah aspirasi semakin tak masuk akal karena tanpa fasilitas ini pun sebelumnya anggota Dewan tetap bisa menampung aspirasi konstituennya secara maksimal. Mereka bisa memanfaatkan jaringan partainya di daerah untuk keperluan ini. Di era teknologi informasi sekarang, politikus juga dapat memanfaatkan Internet sebagai media penjangkauan aspirasi. Mereka tinggal membikin blog atau membuka akun di situs sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Tidaklah elok politikus Senayan mati-matian memperjuangkan alokasi anggaran buat rumah aspirasi. Kalau pun mereka mengusulkan peningkatan fasilitas anggota Dewan, apa pun bentuknya, akan lebih afdol jika pelaksanaannya baru berlaku untuk anggota DPR periode berikutnya. Dengan begitu, politikus Senayan terhindar dari tuduhan bahwa mereka cenderung menyalahgunakan fungsi *budgeting* demi kepentingan mereka sendiri. ●

KUTIPAN

“Ini jelas mereduksi fungsi aspirasi dan artikulasi dewan perwakilan rakyat daerah dan partai politik.”

Ketua Fraksi PDI Perjuangan **Tjahjo Kumolo**, kemarin, mempertanyakan rencana pembangunan rumah aspirasi di daerah atas usulan Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

“Kalau wasitnya tidak adil, bisa membahayakan.”

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal **Alex Bambang Riatmodjo**, meminta agar wasit yang memimpin pertandingan Sriwijaya FC melawan Arema, Ahad malam lalu, diganti karena dinilai tak memimpin pertandingan dengan baik pada babak pertama.

Rumah Aspirasi Akan Memangkas Peran Partai

Dinilai mubazir.

JAKARTA — Gagasan untuk membangun rumah aspirasi bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditolak karena dinilai berpotensi menggerus peran partai politik dan para wakil rakyat di daerah. Model penyerapan aspirasi yang dibuat dengan basis individual itu dianggap tak sesuai dengan sistem demokrasi Indonesia.

“Ini jelas mereduksi fungsi aspirasi dan artikulasi DPRD serta partai politik,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan **Tjahjo Kumolo** kemarin. “Uangnya lebih baik buat beli traktor tangan untuk petani, atau mesin generator buat nelayan.”

Wakil Ketua DPR **Pramono Anung**, yang juga dari PDI Perjuangan, pun mengaku secara pribadi tak melihat

urgensi usulan Badan Urusan Rumah Tangga DPR itu. Menurut dia, penyerapan aspirasi semestinya menjadi tugas partai politik.

Ia menambahkan, usulan soal rumah aspirasi ini sudah dibahas di Badan Anggaran DPR. Kalau nantinya disetujui pun, katanya, ia berpendapat tak perlu dibuat untuk setiap anggota Dewan. “Cukup per kota.”

Selain menurut dia tidak efektif, **Pramono** tak sepakat karena model ini akan menyerap anggaran terlampau besar. “Kalau perorangan, satu daerah pemilihan bisa tujuh sampai sebelas rumah aspirasi.”

Ia mencontohkan, satu daerah pemilihan di Jawa Timur ada yang mencakup beberapa daerah, seperti Kediri, Tulungagung, dan Blitar. “Kalau dibuat di Kediri, mana ada orang Blitar akan datang ke tempat saya hanya untuk

menyampaikan aspirasinya.”

Sekretaris Fraksi PPP **Romahurmuziy** khawatir usulan rumah aspirasi hanya akan mereduksi substansi dan tujuan penyerapan suara rakyat menjadi sekadar pembangunan fisik semata. Ia melihat urusan menyerap aspirasi justru akan lebih efektif bila dilakukan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi.

“Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui *e-mail*, telepon, SMS, atau dengan kotak pos seperti yang dilakukan Presiden **Yudhoyono**,” katanya. “Cara itu bisa jauh lebih hemat.”

Sekretaris Fraksi Hanura **Syarifuddin** Suding menyatakan pembuatan rumah aspirasi adalah langkah mubazir. Fraksinya menilai cara ini tak akan efektif dalam menyerap aspirasi.

Menurut dia, masa reses adalah waktu yang paling

efektif untuk menyerap aspirasi. Suding menganggap rencana pemberian Rp 200 juta per tahun kepada setiap anggota itu sebagai pemborosan. Sebab, selama ini setiap wakil rakyat sudah mendapat dana reses hampir Rp 50 juta per tahun. “Itu gunanya untuk menyerap aspirasi.”

Ade Komaruddin dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, sejumlah anggota Dewan sudah membuat semacam rumah aspirasi sendiri. “Sumber dananya dari pribadi,” katanya. “Cukup atau tidak cukup, dana reses itu harus dicukupkan.”

Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat mengakui dana reses yang diterimanya memang tak mencukupi. “Yang pasti, aku *nombok*,” katanya. “Bisa membengkak dua-tiga kali lipat dari yang dianggarkan.” ● **ADISTI DINI | MUTIA RESTY**

| **AMIRULLAH | TOMI**



EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Persiapan 65 Tahun Kemerdekaan

Seorang pekerja membersihkan patung wakil presiden Republik Indonesia pertama, **Mohammad Hatta**, di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, kemarin. Pembersihan patung proklamator **Soekarno-Hatta** ini sebagai persiapan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65.

Biaya Pindahan Ibu Kota Sangat Besar

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menaksir ongkos untuk pemindahan ibu kota negara ke wilayah lain sangat besar. Lembaga ini menyarankan perlunya dilakukan kajian mendalam jika ingin mewujudkannya. “Pindah itu implikasinya luas,” kata Kepala BPS **Rusman Heriawan** di Jakarta kemarin.

Rusman menyarankan agar pemerintah pusat membenahi wilayah DKI Jakarta lebih dulu sebelum memutuskan memindahkan ibu kota. Salah satu caranya adalah tak memusatkan pembangunan mal di Jakarta. “Banyak mal hanya akan menarik lebih banyak pendatang,” kata dia. Pusat belanja, kata

Rusman, sebaiknya didirikan di luar Jakarta, misalnya di Karawang.

Wacana pemindahan ibu kota negara mencuat karena kemacetan di DKI Jakarta semakin menggila. Perbincangan soal pemindahan ibu kota itu pertama bergulir di seminar yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pekan lalu.

Beberapa daerah yang di jagokan menggantikan Jakarta, antara lain, kota di pinggir Jakarta, Palangkaraya, serta salah satu kota di Indonesia timur. Sebagian pembicara menolak gagasan tersebut. Dewan Penasihat Presiden **Emil Salim**, misalnya, menilai tata ruang Ja-

karta masih mampu mendukung aktivitas skala regional dan global.

Menurut Menteri Dalam Negeri **Gamawan Fauzi**, dalam pemerintahan Presiden **Soekarno** memang pernah muncul rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Saat itu alasan yang dikemukakan adalah tak adanya potensi gempa di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Tapi kini keinginan pindah muncul lantaran dalih kemacetan lalu lintas yang parah di Jakarta. “Serahkan saja kepada DKI Jakarta,” kata dia, akhir pekan lalu.

Gubernur DKI Jakarta **Fauzi Bowo** menolak mengomentari wacana tersebut.

“Karena tugas saya di Jakarta,” kata dia. Namun Wakil Gubernur **Prijanto** mendukung gagasan pemindahan ibu kota.

Menurut **Prijanto**, hal itu akan menyelesaikan problem perkotaan sembari meratakan pembangunan nasional. “Daerah-daerah yang tertinggal di sejumlah wilayah akan ikut berkembang.”

Ia juga tak mempersoalkan seandainya Jakarta dijadikan kota jasa dan pusat perekonomian. Untuk kepentingan ini, kompleks perguruan tinggi yang masih tersebar di dalam kota mesti dipindahkan ke pinggiran Jakarta.

● **EVANA DEWI | ROSALINA | RIKY FERDIANTO |**
JOBPIE S